

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit bisnis produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional, baik sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, alat pengentasan kemiskinan, maupun sumber pendapatan devisa bagi negara (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022). Selain itu, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis, seperti saat krisis ekonomi 1997-1998 maupun pandemi Covid-19, di mana banyak usaha besar mengalami penurunan drastis, sementara UMKM tetap bertahan dan beradaptasi. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan UMKM menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Tidak hanya itu, UMKM juga memiliki peran krusial dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Buleleng. Selama empat tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah UMKM di daerah ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng tahun 2024, jumlah UMKM pada tahun 2020 tercatat sebanyak 34.374 unit. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 54.489 unit dan terus bertambah pada tahun 2022 menjadi 57.216 unit. Pertumbuhan ini semakin

pesat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai 66.368 unit, hingga akhirnya pada tahun 2024 mencapai 79.470 unit. Tren positif ini mencerminkan semakin kuatnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian lokal, didorong oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, peningkatan akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha. Namun, di balik pertumbuhan jumlah UMKM tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama dalam aspek kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis mereka.

Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, kinerja keuangan sektor usaha di Kabupaten Buleleng masih menghadapi kendala. Berdasarkan data Balitbang Kabupaten Buleleng dan LP2M Undiksha tahun 2020, banyak UMKM mengalami penurunan signifikan dalam aspek penjualan, laba, serta keterbatasan modal untuk pengembangan usaha. Selain itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit (Tabel 1), yang semakin memperburuk kondisi keuangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan jumlah UMKM, keberlanjutan usaha mereka masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM serta strategi untuk meningkatkan daya tahan dan perkembangan sektor ini.

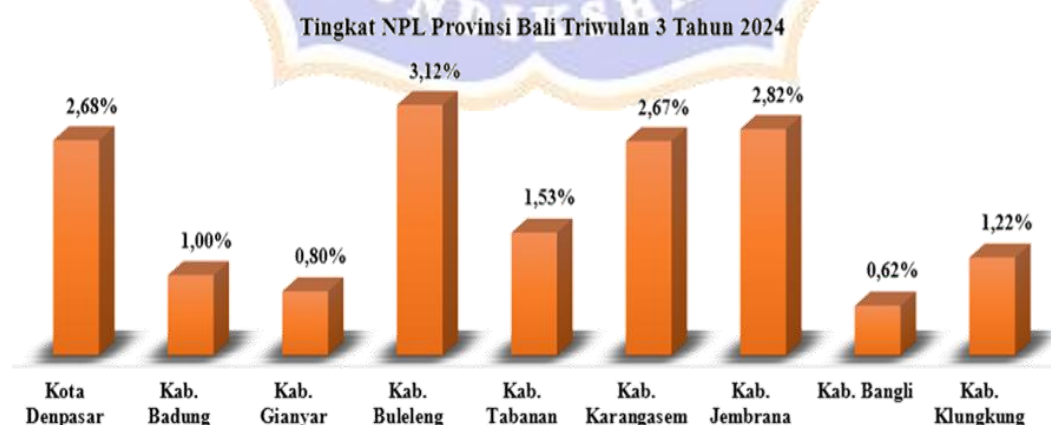
Tabel 1.1
Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng

No.	Aspek	Rata-rata Persentase
1.	Penurunan Penjualan	62%
2.	Penurunan Laba Usaha	61%
3.	Permasalahan Modal	Dialami oleh 71,4% UMKM
4.	Penurunan Kemampuan Pembayaran Angsuran Bank	Dirasakan hampir 100% UMKM

(Sumber: Balitbang Kab. Buleleng & LP2M Undiksha, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1, UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan, dengan rata-rata penurunan penjualan sebesar 62% dan laba usaha sebesar 61%. Hal ini mencerminkan kesulitan sebagian besar pelaku UMKM dalam mempertahankan daya saing dan mencapai pertumbuhan yang stabil. Selain itu, 71,4% pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha, serta banyak juga yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran bank, sehingga hal ini menunjukkan lemahnya manajemen arus kas dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial.

Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana kesulitan pembayaran angsuran bank tercermin dalam data *Non-Performing Loan* (NPL) pada triwulan ketiga 2024, yang menempatkan UMKM Kabupaten Buleleng sebagai daerah dengan kredit bermasalah tertinggi di Provinsi Bali yakni mencapai 3,12% (Gambar 1.1). Tingginya angka NPL ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan, pemanfaatan kredit yang lebih produktif, serta penguatan daya saing UMKM di pasar lokal.



Gambar 1.1
NPL Kredit UMKM Provinsi Bali Triwulan 3 Tahun 2024
(Sumber: Bank Indonesia, 2024)

Penurunan kinerja keuangan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelangsungan usahanya. Menurunnya penjualan dan laba usaha dikarenakan adanya kesulitan memperoleh pendapatan yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kredit, terutama kepada bank. Berdasarkan wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam menjaga kestabilan penjualan usaha akibat persaingan yang ketat dan terbatasnya daya beli konsumen. Ketidakmampuan UMKM dalam menghasilkan pendapatan penjualan untuk meraih laba mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang efektif, sementara perencanaan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha (Faisal *et al.*, 2017; Vijaya, 2023).

Masalah modal usaha juga menjadi hambatan utama dalam kemajuan UMKM di Kabupaten Buleleng. Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng kesulitan memperoleh modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan, di mana modal usaha sering digunakan untuk kebutuhan pribadi alih-alih untuk pengembangan bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku pegawai perencanaan kredit BPD Cabang Singaraja, diketahui bahwa sekitar 60% pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menggunakan modal usaha untuk kebutuhan pribadi dan kurang mengelola arus kas serta perencanaan keuangan secara optimal. Banyak pelaku UMKM yang menganggap hasil usaha sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga modal usaha sering digunakan untuk keperluan pribadi, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan

bisnis mereka (Suginam *et al.*, 2021). Maka dari itu, banyak pelaku UMKM terjebak dalam siklus kesulitan keuangan, yang pada akhirnya berisiko memperburuk kinerja keuangan dan meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL).

Kinerja keuangan UMKM dapat diukur melalui berbagai indikator yang menilai keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan laba (Hertadiani & Lestari, 2021). Penurunan laba yang dialami oleh sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 semakin memperburuk kondisi keuangan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan 20 pelaku UMKM di daerah tersebut, hampir seluruhnya mengalami penurunan laba sepanjang tahun 2024. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh pengelolaan arus kas yang tidak efisien dan perencanaan keuangan yang kurang optimal, termasuk dalam penggunaan kredit untuk modal usaha. Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang belum dapat memanfaatkan kredit dengan efektif untuk tujuan bisnis guna mengurangi daya saing mereka di pasar. Penurunan laba yang terus-menerus dapat menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit dan meningkatkan potensi kredit bermasalah. Oleh karena itu, laba yang optimal sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan menjaga kesehatan keuangan UMKM (Fitriyana & Prasajo, 2022). Indikator kinerja keuangan UMKM adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, penambahan tenaga kerja tiap tahunnya, pertumbuhan pasar serta pemasaran, dan pertumbuhan laba usaha (Munizu, 2010).

Kinerja keuangan UMKM dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dipaparkan oleh salah satu teori yaitu *Resource-Based View*. *Resource-Based View* memaparkan mengenai hubungan

antara sumber daya organisasi dan kapabilitas organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan (Barney, 1991). Fokus dari teori *Resource-Based View* adalah pada analisis internal perusahaan terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu usaha akan memperoleh keuntungan serta mencapai kinerja yang baik dari segi keuangan maupun non-keuangan dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan aset-aset strategis yang baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud (Wernerfelt, 1984). Sumber daya perusahaan atau bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu sumber daya modal fisik (teknologi yang digunakan oleh perusahaan, pabrik, peralatan, lokasi bisnis, dan akses ke bahan baku), sumber daya modal manusia (pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan yang dimiliki oleh individu dalam perusahaan), dan sumber daya modal organisasi (struktur pelaporan, perencanaan, serta pengawasan baik di dalam perusahaan maupun dalam hubungannya dengan lingkungan internal) (Barney, 1991). Perusahaan dalam hal ini UMKM memiliki beberapa sumber daya diantaranya yaitu *financial technology* yang termasuk ke dalam sumber daya modal fisik, *locus of control* yang termasuk ke dalam sumber daya modal manusia, dan pengelolaan keuangan yang termasuk ke dalam sumber daya modal organisasi. Dalam pandangan teori *Resource-Based View*, agar memiliki kemampuan bersaing perusahaan harus memiliki sumber daya yang bernilai, langka, tidak mudah ditiru, dan tidak mudah tergantikan (Barney, 1991).

Berdasarkan teori *Resource-Based View*, faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah *financial technology* sebagai sumber daya modal fisik. *Financial technology* merupakan penerapan teknologi dalam sistem keuangan guna menghasilkan produk dan layanan baru. Model bisnis yang mengadopsi

teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah dinamika stabilitas moneter serta sistem keuangan secara keseluruhan dengan fokus pada efisiensi dan fleksibilitas, serta menjunjung tinggi aspek keamanan dan keandalan dalam proses pembayaran. Ketersediaan fitur dan layanan keuangan yang canggih memudahkan masyarakat selama proses pembayaran (Giriani, 2021). Layanan keuangan berbasis digital yang telah dikembangkan di Indonesia dapat dibedakan secara umum yakni *peer-to-peer* (p2p) *lending*, *payment channel*, *digital insurance*, *digital banking*, dan *crowdfunding* (Yuannisa *et al.*, 2023). UMKM dapat memanfaatkan layanan *financial technology* untuk mengembangkan usaha, terutama dalam meningkatkan kinerja keuangan agar lebih maju dan berkembang.

Kehadiran *financial technology* memiliki potensi besar untuk membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan kemudahan akses ke sistem pembayaran. Salah satu layanan yang selalu dimanfaatkan oleh pelaku UMKM adalah *payment channel* berbasis *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) yang menyediakan alat pembayaran elektronik dan memungkinkan pengecekan pembayaran dalam transaksi jual beli *online* secara otomatis. Melalui penggunaan QRIS, UMKM dapat menerima metode pembayaran secara cepat, efisien, dan mudah hanya dengan memindai *QR code* melalui aplikasi *mobile*. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa 18 pelaku UMKM enggan menggunakan QRIS dalam proses transaksi karena kekhawatiran terhadap risiko penipuan (*scam*). Selain itu, pelaku UMKM tersebut juga merasa bahwa penggunaan QRIS dapat mempersulit pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnisnya. Menurut Alifia *et al.*, (2024)

menyatakan bahwa penggunaan QRIS dianggap tidak aman oleh pelaku UMKM karena adanya kekhawatiran terhadap penipuan dan potensi kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan bisnis.

Kondisi ini berdampak pada kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng, yang mengalami penurunan penjualan dan laba akibat kurangnya pemanfaatan peluang di era digital. Di era digital saat ini, banyak pelanggan dari Generasi Z (Gen Z) yang lebih memilih metode pembayaran berbasis teknologi QRIS, sehingga UMKM yang belum beradaptasi dengan teknologi berisiko kehilangan kesempatan untuk menarik segmen pasar ini. Data dari Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 43,45% UMKM di Indonesia telah menggunakan layanan teknologi keuangan seperti *e-money* dan *payment channel* dalam mendukung operasional bisnisnya. Menurut Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali tahun 2024 mencatat bahwa jumlah penjual atau *merchant* pengguna QRIS di Provinsi Bali mencapai 778.397 *merchant*. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan QRIS berpotensi meningkatkan penjualan dan laba, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM (Puspitaningrum *et al.*, 2023). Maka dari itu, penerapan *financial technology* menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses UMKM terhadap pasar serta sumber daya yang lebih luas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa apabila pemanfaatan *financial technology* pada UMKM di Kabupaten Buleleng ditingkatkan, maka akan ada peluang untuk mendorong kinerja keuangan UMKM.

Penelitian terdahulu terkait dengan *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Berdasarkan penelitian Pandak & Nugroho (2023), Monica & Ruzikna (2024), dan Saputra & Wibowo

(2024) menyatakan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Kemudian, berdasarkan penelitian Mezaluna & Wibowo (2024) menyatakan bahwa *financial technology* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan, berdasarkan penelitian Lubis & Nurhayati (2024) menyatakan bahwa *financial technology* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Berbagai ketidakkonsistenan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih diperlukannya penelitian terhadap pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM. Indikator *Financial technology* adalah cepat, efisien, dan mudah diakses (Putri *et al.*, 2023).

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM berdasarkan teori *Resource-Based View* adalah *locus of control* sebagai sumber daya manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Julian Rotter seorang ahli teori pembelajaran sosial pada tahun 1996, yang menjelaskan bahwa *locus of control* merujuk pada cara pandang individu terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan peristiwa dalam hidupnya (Mien & Thao, 2015; Sakinah, 2020). *Locus of control* terbagi menjadi dua kategori yakni eksternal dan internal. Individu dengan *locus of control* eksternal cenderung meyakini bahwa peristiwa dalam hidup mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, seperti nasib, keberuntungan, atau takdir. Sebaliknya, individu dengan *locus of control* internal mempercayai bahwa hasil dalam hidupnya ditentukan oleh tindakan, keputusan, atau perilaku sendiri (Robbins *et al.*, 2017). Keyakinan individu terhadap kontrol atas hasil kehidupannya dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, termasuk dalam mengelola sumber daya keuangan. Oleh karena itu, *locus of control*

internal yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya secara lebih efektif. Pelaku UMKM dengan *locus of control* yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk merencanakan keuangan secara efektif. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya terlihat pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, yang secara umum masih menunjukkan keterbatasan dalam hal kemampuan, minat, dan usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Akibatnya, kinerja keuangan UMKM di daerah ini cenderung kurang optimal.

Penelitian ini difokuskan pada *locus of control* internal karena relevan terhadap kondisi di lapangan terkait dengan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng ditemukan bahwa 17 pelaku UMKM belum memiliki *locus of control* internal yang baik, terutama dalam kemampuan mengendalikan dan mengelola keuangan usahanya. Pelaku UMKM tersebut tidak melakukan kendali dan pengelolaan keuangan secara sistematis, sehingga sulit mengendalikan operasional usahanya secara efektif. Menurut Suryantara & Ridhawati (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak sistematis mengakibatkan sulitnya UMKM dalam mengendalikan operasional dan mengambil keputusan yang tepat. Kondisi ini berdampak buruk pada stabilitas dan pertumbuhan keuangan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat kepercayaan diri, inisiatif, minat, dan kreativitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya agar lebih terstruktur dan terencana guna mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan *locus of control* terhadap kinerja keuangan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Dalam penelitian

Darmawan *et al.* (2021) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan, dalam penelitian Saputra & Wibowo (2024) dan Sukmawati & Amaslia (2024) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Berbagai ketidakkonsistenan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya penelitian terhadap pengaruh *locus of control* terhadap kinerja keuangan UMKM. Indikator *locus of control* internal adalah kemampuan, minat, dan usaha (Sanjiwani & Wisadha, 2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM berdasarkan teori *Resource-Based View* adalah pengelolaan keuangan sebagai sumber daya modal organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik dan cermat sangat penting dilakukan sebagai upaya penentuan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Ketidakmampuan mengelola keuangan secara tepat dapat menghambat pelaku usaha dalam mengambil tindakan preventif terhadap kecurangan yang bisa saja terjadi dalam operasional bisnis (Syaula *et al.*, 2023). Bagi UMKM yang sering kali mengalami sulitnya sumber daya finansial, maka pengelolaan keuangan yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan berwirausaha. Melalui pengelolaan yang tepat, pelaku UMKM dapat membuat pengalokasian sumber daya secara optimal bagi operasional, investasi, dan pengembangan usaha. Salah satu langkah penting dalam mengelola keuangan yang baik adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan oleh pelaku usaha agar tata kelola dan akuntabilitasnya sebanding dengan yang diterapkan oleh perusahaan besar (Masdiantini *et al.*, 2024). Selain itu, stabilitas keuangan usaha yang didorong oleh transparansi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan

sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal, meningkatkan efisiensi, serta mendukung daya saing dan inovasi dalam ekosistem bisnis modern (Devi *et al.*, 2020; Purnamawati *et al.*, 2023). Hal ini juga relevan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan UMKM, sehingga efisiensi penggunaan modal usaha dapat tercapai, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba usaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa 17 pelaku UMKM cenderung mengabaikan perencanaan keuangan yang sistematis. Pelaku UMKM tersebut hanya mengandalkan ingatan dan nota-nota sederhana untuk mencatat transaksi keuangan, tanpa adanya perencanaan keuangan yang terstruktur dan sistematis. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dalam memantau kinerja keuangan secara akurat dan berdampak negatif pada pengambilan keputusan yang strategis. Menurut Manullang (2024) menyatakan bahwa kurangnya pencatatan yang terstruktur dan sistematis menyebabkan UMKM sering kali kesulitan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan memutuskan keputusan penting sehingga berdampak pada pertumbuhan bisnis. Keterbatasan dalam pengelolaan keuangan berpotensi menurunkan efisiensi operasional dan laba usaha, serta mengancam keberlanjutan usaha itu sendiri. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat memiliki dampak positif terhadap keberhasilan suatu bisnis (Djou, 2019). Namun, kenyataannya banyak pelaku usaha yang belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang pada gilirannya menjadi kendala dalam kinerja keuangan usahanya (Cahyani, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Dalam penelitian Romain *et al.* (2021), Daud *et al.* (2023), dan Hartina *et al.* (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan Musdalifa *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Berbagai ketidakkonsistenan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya penelitian mendalam terhadap pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM. Indikator pengelolaan keuangan adalah memisahkan uang pribadi dan usaha, merencanakan penggunaan uang, membuat perencanaan keuangan, melakukan perputaran arus kas lebih cepat, serta menentukan target dan evaluasi bisnis (Dwiastanti *et al.*, 2022).

Research gap dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang serupa. Kebaruan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, di mana penelitian terdahulu sebanyak 11 yakni Darmawan *et al.* (2021); Romain *et al.* (2021); Musdalifa *et al.* (2021); Daud *et al.* (2023); Pandak & Nugroho (2023); Hartina *et al.* (2023); Monica & Ruzikna (2024); Mezaluna & Wibowo (2024); Lubis & Nurhayati (2024); Saputra & Wibowo (2024); dan Sukmawati & Amaslia (2024) mengambil tempat penelitian di luar Kabupaten Buleleng, sedangkan tempat penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat produktivitas usaha yang tinggi, tetapi menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM, seperti penurunan penjualan, penurunan laba usaha, permasalahan modal usaha, dan penurunan kemampuan pembayaran

angsuran bank yang menyebabkan tingginya NPL di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng untuk memberikan kontribusi yang relevan terkait peran *financial technology*, *locus of control*, dan pengelolaan keuangan dalam mendukung kinerja keuangan UMKM. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada perbedaan sampel (jenis) UMKM, yang mana pada penelitian Monica & Ruzikna (2024); Saputra & Wibowo (2024); dan Sukmawati & Amaslia (2024) hanya terfokus pada UMKM kuliner, sedangkan penelitian penulis menggunakan keseluruhan jenis UMKM yakni sektor perdagangan, kuliner, pertanian, non pertanian, industri, dan jasa.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Financial Technology*, *Locus of Control*, dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami permasalahan serius terkait kinerja keuangan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, UMKM mengalami kondisi penurunan penjualan, penurunan laba usaha, permasalahan modal usaha, dan penurunan kemampuan pembayaran angsuran bank yang menyebabkan tingginya NPL.
2. Sebanyak 18 dari 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih dalam proses adaptasi terhadap penggunaan *financial technology* khususnya QRIS dalam

kegiatan transaksi jual beli, dan belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Kondisi ini menjadi hambatan bagi kinerja keuangan UMKM karena kurangnya pemahaman serta ketidakpercayaan terhadap teknologi keuangan modern.

3. Sebanyak 17 dari 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng belum menunjukkan *locus of control* internal yang baik, khususnya kemampuan mengendalikan dan mengelola keuangan usahanya. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut tidak melakukan perencanaan keuangan yang memadai, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kinerja keuangan UMKM.
4. Sebanyak 17 dari 20 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih kurang dalam hal pengelolaan keuangan. Pelaku UMKM tersebut cenderung hanya mengandalkan ingatan dan nota-nota sederhana untuk melakukan pencatatan transaksi jual beli, tanpa didukung oleh perencanaan keuangan yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam memantau kinerja keuangan secara akurat, sehingga berdampak negatif pada pengambilan keputusan strategis dan efisiensi operasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penelitian ini mempunyai tujuan agar permasalahan yang diteliti oleh peneliti tidak melebar, sehingga peneliti melakukan pembatasan masalah pada variabel *financial technology*, *locus of control*, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji pengaruh *locus of control* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori *Resource-Based View*, kemudian juga berkontribusi terhadap pengembangan mata kuliah Akuntansi Keuangan, Akuntansi UMKM, Pengantar Bisnis, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Manajemen, dan Kewirausahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana *financial technology*, *locus of control*, dan pengelolaan keuangan mempengaruhi kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Melalui analisis yang komprehensif, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng dalam menyusun kebijakan strategis yang efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan sektor UMKM. Sehingga, UMKM di Kabupaten Buleleng mampu menghadapi tantangan finansial.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM mengenai *financial technology*, *locus of control*, dan pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

